

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) DI SMP N 2 PAKEM PADA MASA PANDEMI COVID-19

IMPLEMENTATION OF POPULATION ALERT SCHOOL IN SMP N 2 PAKEM DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Oleh: Afanin Nisrina Fathin, Universitas Negeri Yogyakarta
afaninnisrina.2017@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan implementasi kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem pada masa pandemi Covid-19 serta faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, koordinator tim SSK, guru, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Implementasi kebijakan sekolah siaga kependudukan didukung melalui pengintegrasian pendidikan kependudukan kedalam mata pelajaran, inovasi program sekolah yaitu GELIAT SIGAP, pramuka kependudukan, PIK-R, dan *parenting*. Implementasi kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem pada masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh empat faktor menurut teori George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sekolah Siaga Kependudukan, Pandemi Covid-19.

Abstract

This research aims to describe the implementation stages of the Population Alert School policy in SMP N 2 Pakem during the Covid-19 pandemic along with factors that affect the policy. This research uses a descriptive qualitative approach. The subjects of the study were the principal, SSK team coordinator, teachers, and students. Data collection techniques use observation, documentation, and interviews. Data analysis uses Miles and Huberman's interactive methods. Test the validity of data with source triangulation and triangulation techniques. The results showed that the implementation of the Population Alert School policy in SMP N 2 Pakem was carried out through three stages, namely the interpretation, organizing, and application stages. The implementation of the Population Alert School policy is supported through the integration of population education into subjects, school program innovation namely GELIAT SIGAP, population scouting, PIK-R, and parenting. The implementation of the Population Alert School policy in SMP N 2 Pakem during the Covid-19 pandemic was influenced by four factors based on George Edward III theory namely communication, resource, disposition or attitude, and bureaucratic structure.

Keywords: Policy Implementation, Population Alert School, Covid-19 Pandemi.

PENDAHULUAN

Dilansir dari data terakhir yang dirilis oleh *Worldometers* pada Desember 2020 lalu, Indonesia menduduki peringkat keempat negara populasi terbanyak di dunia dengan jumlah populasi penduduk 273.523,615 jiwa. Menyandang predikat

negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia tidak menjadikan Indonesia jauh dari permasalahan kependudukan. Justru sebaliknya, ada beberapa permasalahan kependudukan yang dialami oleh bangsa ini. Diantaranya adalah tingginya angka pernikahan sekaligus melahirkan di usia muda. Berdasarkan data Komnas

Perempuan, angka pernikahan dini melonjak hampir tiga kali lipat pada tahun 2020. Jumlah pernikahan dini sepanjang tahun 2020 tercatat mencapai 64.211, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yaitu 23.126. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang masih berada di bawah standar kesejahteraan dan yang akan datang adalah permasalahan ledakan kelahiran pasca pandemi Covid-19 juga menjadi permasalahan kependudukan yang akan dialami bangsa Indonesia. BKKBN memperkirakan terdapat 400.000-500.000 angka kelahiran tidak diinginkan di Indonesia sebagai dampak dari demografi pandemi Covid-19 (Setiawan, 2020).

Pada tahun 2030-2040 mendatang, Indonesia akan memasuki era bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif yaitu penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun, akan lebih banyak dibandingkan penduduk usia non-produktif yaitu usia 64 tahun ke atas. Bonus demografi akan menjadi fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan (Asrie, 2020). Pada kesempatan kondisi bonus demografi ini, bangsa Indonesia memiliki kesempatan besar memacu produktivitas dan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun ekonomi.

Edukasi mengenai kependudukan kepada masyarakat wilayah luas dapat dimulai melalui pendidikan di sekolah. Dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. BKKBN memiliki amanah untuk memberikan literasi atau pengetahuan mengenai kependudukan agar masyarakat sadar akan pentingnya manfaat yang harus disiapkan dan digunakan serta permasalahan-permasalahan yang harus dihindari dari dampak kependudukan. Salah satu upayanya melalui Sekolah Siaga Kependudukan (bkkbn.go.id, 2019).

Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan merupakan wadah bagi program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang juga menysasar generasi muda seperti program GenRe dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja sehingga dapat berjalan berdampingan dan saling bersinergi. *Output* dari program SSK yaitu pemahaman tentang kependudukan, baik kuantitas, kualitas persebaran yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung pentingnya kesehatan reproduksi dan pembentukan keluarga yang berkualitas serta diharapkan

dapat meminimalisir perkawinan usia anak (BKKBN, 2019).

Kabupaten Sleman menjadi salah satu kabupaten yang telah menyelenggarakan Sekolah Siaga Kependudukan pada pendidikan formal jenjang SD hingga SMA. Pada tanggal 13 Oktober 2020, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menetapkan SK nomor 461.1/KPTS/2020 mengenai Penetapan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Sleman. Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan 75 sekolah negeri yang terdiri dari 42 sekolah jenjang SMP dan 33 sekolah jenjang SD sebagai pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Sleman. Salah satu sekolah yang ditetapkan menjadi Sekolah Siaga Kependudukan adalah SMP N 2 Pakem. Pada 18 Maret 2020, Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun meresmikan SMP N 2 Pakem sebagai Sekolah Siaga Kependudukan yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh seluruh instansi terkait termasuk warga sekolah. Deklarasi tersebut sebagai bentuk komitmen awal dari berbagai pihak untuk mendukung pendidikan kependudukan melalui pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan.

Berdasarkan wawancara pra-penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, latar belakang dilaksanakannya SSK di SMP N 2 Pakem salah satunya karena letak

sekolah yang berada di kawasan wisata sehingga dikhawatirkan terjadi pergaulan bebas di kalangan remaja yang dapat berdampak pada pernikahan usia dini. Melalui tindakan preventif berupa penanaman pengetahuan kependudukan maka diharapkan hal tersebut tidak terjadi.

SMP N 2 Pakem pada tanggal 28 September 2020 lalu, meraih peringkat pertama lomba Sekolah Siaga Kependudukan se-Kabupaten Sleman yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Selain itu, di tahun pertama pelaksanaan kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan, SMP N 2 Pakem berhasil memperoleh predikat Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna dari BKKBN.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Alfin dan FX. Sri Sadewo, penelitian tersebut bertujuan untuk melihat realitas pihak sekolah dalam merespon intruksi yang diberikan pemerintah (BKKBN) untuk menjalankan Pendidikan Kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) *Adaptation*, SSK bukan merupakan mata pelajaran baru, melainkan materi pelajaran yang dipertajam dan disesuaikan dengan kondisi kependudukan saat ini, (2) Tujuan dari SSK menumbuhkan peserta didik yang sadar dan bertanggung jawab terhadap

kondisi kependudukan yang ada disekitarnya, (3) Integrasi pendidikan kependudukan melalui SSK baik dalam kurikulum dan kelembagaan, (4) *Latency*, membangun nilai dan moral pada individu yang berkarakter di tengah masyarakat, seperti sifat sadar kependudukan, peduli terhadap sesama, dan toleransi antar sesama (Sadewo & Awwaluddin, 2021).

Penelitian relevan berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aliqul Abdiyah, dkk dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan SSK di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari tahun 2017 hingga 2019 ada sebanyak 58 SMA/ sederajat dan 24 SMP/ Sederajat di Jawa Timur telah mengikuti program SSK. Sebanyak 20,8% sekolah sudah memenuhi kriteria standar keberhasilan SSK. Standar keberhasilan tersebut antara lain memiliki surat keputusan pembentukan, memiliki papan nama, terbentuknya pojok kependudukan, adanya integrasi materi kependudukan pada mata pelajaran reguler dalam bentuk RPP, dan adanya kegiatan yang bertema kependudukan.

Berawal dari berbagai penelitian sebelumnya mengenai pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan berdasarkan teori AGIL Talcott Parsons dan berdasarkan kriteria keberhasilan SSK, maka penelitian ini berfokus pada implementasi SSK di

SMP N 2 Pakem yang berada di Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan implementasi kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem pada masa pandemi Covid-19 serta faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Charles O. Jones mengemukakan bahwa implementasi merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas utama yaitu interpretasi, organisasi, dan aplikasi (Jones, 1996:296). Begitu pula pada pelaksanaan kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem yang terdiri dari kegiatan interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Selanjutnya, menurut George Edward III, terdapat empat variabel penting yang harus diperhatikan untuk melihat berbagai faktor terhadap kegagalan dan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat faktor tersebut antara lain komunikasi, disposisi atau sikap, struktur birokrasi, dan sumber daya.

Menimbang dari keberhasilan SMP N 2 Pakem dalam menyelenggarakan Sekolah Siaga Kependudukan dan belum adanya penelitian mengenai implementasi Sekolah Siaga Kependudukan terutama di Kabupaten Sleman, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan pada Masa Pandemi di SMP N 2 Pakem.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2020:9). Pada penelitian ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan suatu kejadian yang sesuai dengan apa yang dialami secara langsung oleh subjek penelitian dan menyajikan data dalam bentuk uraian kata-kata mengenai pelaksanaan kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem pada masa pandemi Covid-19.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pakem yang beralamatkan di Jalan Kaliurang KM 20 Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Agustus hingga Oktober 2021.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Koordinator Tim SSK, Guru, dan Peserta didik SMP N 2 Pakem. Subjek penelitian tersebut diambil menggunakan teknik *purposive sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dalam penelitian ini mengumpulkan data mengenai pelaksanaan kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2020:114). Pada penelitian ini, peneliti dalam memperoleh informasi melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, Koordinator Tim SSK, Guru, dan Peserta Didik SMP N 2 Pakem.

3. Dokumentasi

Nana Syaodih (2015:221) mendefinisikan studi dokumentasi sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendukung kelengkapan data dari hasil observasi dan wawancara mengenai

implementasi kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Model Interaktif Miles and Hubberman yang dikutip dalam Sugiyono (2020:143) yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem pada Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan yang dibentuk oleh BKKBN sebagai sikap preventif dan persuasif pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia. Sehingga pelaksanaan SSK di SMP N 2 Pakem merupakan bentuk dukungan dan kontribusi sekolah dalam rangka membantu pemerintah memberikan pengetahuan pemahaman kepada peserta didik mengenai pendidikan kependudukan.

Sekolah Siaga Kependudukan dibentuk sebagai upaya Pemerintah

Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan capaian pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA). Selain itu juga sebagai upaya pemerintah untuk membentuk dan mempersiapkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia pada tahun 2030-2040 mendatang.

Pelaksanaan kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem melalui beberapa tahapan yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Implementasi kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan dipengaruhi oleh empat faktor menurut George Edward III dalam (Widodo, 2010:96) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Tahap Implementasi Kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem

Dalam menerapkan kegiatan atau program sekolah tersebut diidentifikasi terlebih dahulu siapa yang menjadi pelaku kebijakan, sumber daya anggaran, maupun fasilitas yang dibutuhkan, sehingga ketika unsur-unsur tersebut sudah dipenuhi, langkah selanjutnya adalah menerapkan kebijakan sekolah siaga kependudukan melalui program-program yang telah disusun oleh sekolah yang mencakup tahapan interpretasi, tahapan pengorganisasian, dan tahapan aplikasi.

a. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi kebijakan

dilakukan agar kebijakan yang akan dilaksanakan memiliki rencana yang jelas dan terarah dengan tepat sehingga dapat diterima serta dipahami oleh kelompok sasaran. Pada tanggal 13 Oktober 2020, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengeluarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman No. 461.1/KPTS/2020 mengenai Penetapan Sekolah Siaga Kependudukan di Kabupaten Sleman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menunjuk 75 sekolah sebagai pengembang sekolah siaga kependudukan, termasuk SMP N 2 Pakem. Berikutnya, proses yang dilalui sekolah dalam merumuskan kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem adalah pembentukan tim sekolah siaga kependudukan atau disebut forum peduli pendidikan. Pembentukan tim tersebut berdasarkan SK Kepala Sekolah SMP N 2 Pakem Nomor 800/0625 mengenai Tim Sekolah Siaga Kependudukan SMP N 2 Pakem.

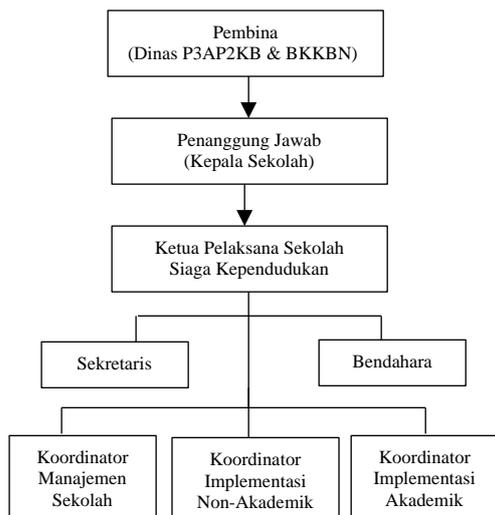
Kegiatan interpretasi selanjutnya, tim SSK SMP N 2 Pakem melaksanakan perencanaan melalui rapat atau musyawarah seluruh tim untuk merumuskan beberapa kegiatan penunjang sekolah siaga kependudukan, melakukan *workshop* penyusunan RPP, dan merencanakan sosialisasi kegiatan. Sosialisasi juga menjadi salah satu bagian penting dalam tahapan interpretasi karena mengkomunikasikan kebijakan serta

kegiatan kepada kelompok sasaran diantaranya peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan secara *online* melalui *zoom meeting* atau *google meet* karena terbatasnya kondisi di tengah pandemi Covid-19.

b. Tahap Pengorganisasian

Kegiatan dalam tahap pengorganisasian ini berfokus pada penetapan sumber daya manusia yang akan berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan serta proses pengaturan kegiatan berupa anggaran dan fasilitas.

Pada tahap pengorganisasian pelaksanaan kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem telah dibentuk susunan kepengurusan dengan melibatkan hampir seluruh guru di SMP N 2 Pakem. Tim pelaksana SSK disebut tim forum peduli kependudukan berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor 461.1/KPTS/2020 mengenai penetapan Sekolah Siaga Kependudukan. Selanjutnya, pembentukan tim forum peduli kependudukan di SMP N 2 Pakem dibentuk berdasarkan SK Kepala Sekolah SMP N 2 Pakem Nomor 800/0625 mengenai tim Sekolah Siaga Kependudukan. Masing-masing anggota tim SSK SMP N 2 Pakem memiliki tugas dalam mengimplementasikan kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Implementasi Kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem

Pengadaan anggaran dana yang diperlukan dalam rangka memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sekolah siaga kependudukan diperoleh dari anggaran dana sekolah dan juga dari paguyuban orang tua peserta didik. Fasilitas yang diperlukan antara lain rak dan buku-buku kependudukan untuk mengisi pojok kependudukan, papan mading, papan data kependudukan, dan lain sebagainya.

c. Tahap Aplikasi

Pelaksanaan kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem dibagi kedalam tiga kegiatan utama yaitu kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler.

1) Kegiatan Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama pembelajaran sekolah yang dilakukan menggunakan alokasi waktu

yang telah ditentukan atau terjadwal. Dalam implementasi kebijakan sekolah siaga kependudukan, kegiatan intrakurikuler di SMP N 2 Pakem adalah mengintegrasikan pendidikan kependudukan dengan mata pelajaran sehari-hari peserta didik. Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler di masa pandemi Covid-19 tetap berjalan seperti biasa melalui media daring seperti *zoom*, *google meet*, ataupun *google classroom*.

2) Kegiatan Kokurikuler

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang bertujuan memperdalam dan menghayati mata pelajaran yang sebelumnya telah dipelajari oleh peserta didik dalam kegiatan intrakurikuler. Bentuk atau jenis kegiatan kokurikuler merupakan bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk membina kemampuan anak didik yang dapat dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah (Yulia, 2018:4).

Kegiatan kokurikuler penunjang sekolah siaga kependudukan, SMP N 2 Pakem pada masa pandemi Covid-19 berupa program inovasi yang menjadi ciri khas pelaksanaan kebijakan sekolah siaga kependudukan yaitu inovasi GELIAT SIGAP. Dalam GELIAT SIGAP mencakup beberapa kegiatan seperti literasi kependudukan dan berbagai lomba kegiatan untuk peserta didik.

3) Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendamping pelajaran yang diberikan pada kegiatan intrakurikuler dan kegiatan tambahan di luar jam pembelajaran sekolah biasa yang diharapkan dapat membantu pembentukan karakter bagi para peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Di SMPN 2 Pakem, kegiatan ekstrakurikuler penunjang sekolah siaga kependudukan diantaranya adalah PIK-R dan pramuka kependudukan. Untuk menanggapi permasalahan yang muncul di kalangan remaja, BKKBN memiliki program Generasi Berencana (GenRe) yang mempromosikan program-program Keluarga Berencana sejak dini bagi kaum remaja. Pesan-pesan GenRe didifusikan melalui iklan, selain itu pesan-pesan GenRe juga disampaikan dalam wadah GenRe yakni Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) dimana sasaran khalayaknya adalah remaja berusia 10-24 tahun dan belum menikah, keluarga dan masyarakat peduli remaja (Noor & Andriani, 2020:403). Sehingga program PIK-R merupakan kegiatan yang dikelola lebih banyak oleh peserta didik. Program kerja yang dibentuk pun berdasarkan musyawarah anggota, guru pembina hanya membimbing dan mengawasi sehingga peserta didik bisa menentukan sendiri apa kegiatan yang nyaman untuk mereka mengembangkan pengetahuan

kependudukan. Selain PIK-R, ekstrakurikuler pramuka kependudukan juga memberikan materi-materi kependudukan sesuai kegiatannya. Selama pandemi pun kegiatan PIK-R masih berlangsung meskipun tidak seaktif sebelum pandemi, namun jika kegiatan pramuka masih berlangsung melalui *zoom*, *google meeting*, ataupun *google classroom*.

4) Kegiatan *Parenting*

Pelaksanaan kebijakan sekolah siaga kependudukan tidak hanya ditujukan kepada peserta didik saja, melainkan juga diimbaskan kepada orang tua peserta didik. Melalui kegiatan *parenting* diharapkan orang tua peserta didik dapat menambah wawasan atau informasi mengenai perkembangan kependudukan serta pencegahan terkait pernikahan dini dan pergaulan bebas remaja. Kegiatan *parenting* dilaksanakan maksimal tiga bulan sekali, meskipun masa pandemi pun tetap dilaksanakan melalui media daring

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem

Teori implementasi yang digunakan dalam melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem adalah teori George Edward III. George Erward III (Putra & Khaidir, 2019:236) memperkenalkan pendekatan untuk implementasi kebijakan adalah dengan mempertanyakan faktor apa saja

yang mendukung serta menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Empat faktor sebagai syarat untuk keberhasilan proses implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem yang terjalin antara guru, peserta didik, komite, orang tua peserta didik, dan lembaga terkait. Komunikasi tersebut berjalan baik dan lancar. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi terhadap kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem yaitu penyaluran komunikasi yang baik dan lancar untuk dapat melaksanakan suatu implementasi kebijakan yang baik, agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan kebijakan SSK. Selain itu, kejelasan dalam berkomunikasi antar anggota; tidak ambigu. Selanjutnya adalah konsistensi dalam pemberian wewenang, tidak berubah-ubah dan membingungkan. Sesuai dengan pernyataan George Edward III (1980) bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan efektif apabila pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan agar keputusan-keputusan kebijakan dapat diteruskan kepada orang yang tepat dengan cara komunikasi yang akurat dan dimengerti secara cermat oleh pelaksana (Adiwiarnarni dkk, 2020:40).

Terdapat pula pembiasaan untuk menanamkan pendidikan kependudukan kepada peserta didik di SMP N 2 Pakem yaitu dengan mengucapkan salam genre yang dipandu oleh guru sebelum memulai pembelajaran. Selama pembelajaran daring pun komunikasi antara guru dan peserta didik tetap berjalan dengan baik melalui zoom atau google meeting ketika pembelajaran dan juga melalui pesan grup *whatsapp*.

b. Sumber Daya

Kebijakan sekolah siaga kependudukan diimplementasikan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya fasilitas. Secara umum, sumber daya manusia yang terdapat di SMP N 2 Pakem sangat potensial. Dibuktikan dengan rata-rata pendidikan terakhir guru maupun karyawan di SMP N 2 Pakem yaitu sarjana perguruan tinggi. Selain sarjana S1, terdapat pula beberapa guru yang telah menempuh sarjana magister atau S2. Selanjutnya sumber daya finansial kebijakan sekolah siaga kependudukan berasal dari dana internal sekolah. Sudah ada anggaran tersendiri untuk setiap program di SMP N 2 Pakem terutama untuk sekolah siaga kependudukan dan juga bantuan dari orang tua peserta didik berupa kas paguyuban. Sumber daya fasilitas di SMP N 2 Pakem antara lain pojok

kependudukan, angkringan kependudukan, dan pojok literasi di setiap kelas. Seluruh sumber daya yang tersedia dioptimalkan sebaik mungkin agar pelaksanaan sekolah siaga kependudukan berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Pojok kependudukan menjadi ciri khas dari pelaksanaan sekolah siaga kependudukan. Dalam pojok kependudukan, terdapat berbagai buku guna meningkatkan literasi peserta didik dan juga papan mading untuk memajang hasil karya peserta didik. Namun, fasilitas ini tidak dapat digunakan secara maksimal oleh peserta didik karena keterbatasan kondisi di masa pandemi covid.

c. Disposisi

Disposisi kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem terwujud dari komitmen kepala sekolah, koordinator tim pelaksana, guru, dan seluruh peserta didik untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah. Para implementor dalam kebijakan sekolah siaga kependudukan berkomitmen untuk melaksanakan sekolah siaga kependudukan secara maksimal. Komitmen yang dibuat tidak hanya selama pelaksanaan di kelas saja, namun diwujudkan dengan sosialisasi dan juga evaluasi yang dilakukan. Kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem mendapat tanggapan baik dan positif serta dukungan penuh dari seluruh warga

sekolah. Para guru mendukung penuh pelaksanaan sekolah siaga kependudukan dengan berupaya menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing semaksimal mungkin. Begitu juga dengan peserta didik yang mendukung penuh dan bersemangat dalam kegiatan pelaksanaan SSK di SMP N 2 Pakem.

Komitmen para pelaksana dan juga kelompok sasaran dalam pelaksanaan sekolah siaga kependudukan di masa pandemi Covid-19 ini terlihat dari peran aktif peserta didik dan juga orang tua/wali dalam mengikuti kegiatan seperti *parenting* untuk orang tua, pembelajaran reguler peserta didik, dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan lomba di media sosial seperti tiktok, youtube, dan instagram. Meskipun terbatasnya kondisi di tengah pandemi covid tidak menyurutkan semangat para peserta didik dalam berkarya untuk mendukung program dari Sekolah Siaga Kependudukan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem terdiri dari pembina dan pengawas pelaksanaan sekolah siaga kependudukan yaitu Dinas P3AP2KB dan BKKBN. Penanggungjawab pelaksanaan SSK di SMP N 2 Pakem adalah kepala sekolah SMP N 2 Pakem. Selanjutnya terdapat tim pelaksana sekolah siaga kependudukan yang terdiri dari ketua tim, sekretaris, dan

bendahara. Dari tim pelaksana tersebut meliputi berbagai bidang koordinasi, diantaranya adalah koordinator manajemen sekolah, koordinator implementasi non akademik, dan koordinator implementasi akademik. Masing-masing bidang koordinasi memiliki tugas dan wewenang masing-masing sesuai yang telah ditetapkan. Pemilihan tim pelaksana berdasarkan musyawarah yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya SK Kepala Sekolah SMP N 2 Pakem No 800/0625 tentang Tim Pelaksana Sekolah Siaga Kependudukan.

Wewenang dan tanggung jawab para pelaksana sudah terbagi sesuai bagian masing-masing. Namun, pada pandemi Covid-19 seperti saat ini, terdapat pembatasan guru yang hadir di sekolah. Tidak semua guru dapat hadir ke sekolah setiap harinya, terdapat jadwal yang sudah ditentukan. Sehingga, saling jika ada tugas yang sekiranya mendadak berkaitan dengan kegiatan SSK, tim SSK akan saling membantu untuk menggantikan tugas satu sama lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara garis besar proses implementasi kebijakan yang relatif dan didukung oleh semua pihak SSK membuat implementasi kebijakan SSK di SMP N 2 Pakem sukses melaksanakan SSK dan

mendapatkan gelar Sekolah Siaga Kependudukan “Paripurna”.

1. Tahapan Implementasi Kebijakan SSK dijabarkan dalam tiga tahapan, yaitu:
 - a. Tahap interpretasi yang berawal dari undang-undang dan peraturan pusat yang di break down menjadi SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan dilanjutkan dengan SK Kepala Sekolah SMP N 2 Pakem.
 - b. Tahap pengorganisasian dilaksanakan dengan penetapan tim pelaksana dan proses pengaturan anggaran serta fasilitas guna melaksanakan kebijakan SSK yang mengacu pada SK Kepala Disdik dan pedoman pelaksanaan SSK.
 - c. Tahap aplikasi kebijakan SSK yang menekankan pada tiga kegiatan utama yaitu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SSK menurut teori George Edward III, yaitu:
 - a. Komunikasi yang berjalan lancar antar implementor meskipun ditengah keterbatasan akibat pandemi Covid-19.
 - b. Sumber daya, terdiri dari SDM manusia yang berkualitas dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana, sumber daya fasilitas berupa pojok kependudukan, angkringan kependudukan, dan lain sebagainya, sumber daya anggaran yang berasal dari anggaran sekolah dan bantuan dari

paguyuban orang tua siswa.

- c. Disposisi/sikap ditunjukkan dengan komitmen yang tinggi baik dari guru, siswa, orang tua, maupun instansi terkait. Terdapat perjanjian kerjasama antara pihak sekolah dengan lembaga terkait untuk bersinergi memberikan pendidikan kependudukan kepada siswa.
- d. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan SSK di SMP N 2 Pakem berjalan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang para *implementor*.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Ada baiknya jika sekolah secara berkala memperbarui informasi data kependudukan agar siswa juga selalu bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai data kependudukan.
2. Penyampaian informasi mengenai kebijakan sekolah siaga kependudukan disosialisasikan lebih sering lagi ke sekolah-sekolah dari SD hingga SMA atau jika lebih baik lagi dijadikan kebijakan yang wajib diimplementasikan di sekolah.
3. Diperlukan alternatif lain untuk sarana peserta didik membaca buku dan mencari materi kependudukan dikarenakan keterbatasan kondisi pandemi Covid-19,

seperti pengadaan media *e-book*. Pengadaan *e-book* untuk peserta didik akan memudahkan kegiatan literasi kependudukan dari mana saja dan juga praktis karena bisa diakses melalui ponsel atau laptop.

4. Pelaksanaan FGD (*focus group discussion*) bersama orang tua dan peserta didik sebagai sasaran kebijakan sekolah siaga kependudukan karena mereka perlu mengetahui sejauh mana pelaksanaan SSK di SMP N 2 Pakem. Melalui FGD, pihak sekolah akan mengetahui bagaimana pendapat orang tua dan peserta didik dan juga memberikan masukan-masukan untuk pelaksanaan SSK kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrie, M. (2020). *Bonus Demografi, Peluang atau Tantangan Mewujudkan Indonesia Emas 2045*. Diakses pada 26 Oktober 2021 dari BKKBN: <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bonus-demografi-peluang-atau-tantangan-menuju-indonesia-emas-2045>
- BKKBN. (2019). *Melalui Sekolah Siaga Kependudukan BKKBN Ajak Generasi Muda Sadar Kependudukan*. Diakses pada 26 Oktober 2021 dari <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/melalui-sekolah-siaga-kependudukan-bkkbn-ajak-generasi-muda-sadar-kependudukan>
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC; Congressional Quarterly Press.

- Jones, Charles O. (1991) *An introduction to the study of public policy*. Jakarta: Rajawali.
- Setiawan, P. N. (2020). *Covid-19 vs Angka Kelahiran*. Diakses pada 28 September 2021 dari viva.co.id: https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1333153-Covid-19-vs-angka-kelahiran?page=3&utm_medium=pag e-3
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaodih, Nana. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yulia, R. (2018). *Skripsi Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler KKD dengan Pengembangan Sikap Spiritual Siswa di MAN 1 Medan*. Diakses dari repository.uinsu.ac.id: <http://repository.uinsu.ac.id/4833/5/BA B%20II.pdf>
- Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edrawrds III on Implementation of Regional Regulations No. 12 of 2017 Concerning Youth in Granting Youth Service in West Sumatera. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 236.
- Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.